

## **PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**Fitrian Romadhon Dwi Saputra, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : [fitrianromadhon@gmail.com](mailto:fitrianromadhon@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Asimilasi memenuhi asas pemsarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nantinya, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang nantinya dapat mereka gunakan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan asimilasi dalam rangka pembinaan anak bernegara dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di wilayah LPKA Kelas II Bandar Lampung. Asimilasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan narapidana dengan kehidupan masyarakat, dengan bimbingan yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pendidikan serta menjadi sarana bagi narapidana untuk berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar. Kendala asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung antara lain: kurangnya petugas yang terdidik secara profesional dan profesional, kurangnya minat masyarakat yang dilayani, kurangnya pelatih narapidana Sesuai dengan kebutuhan teknologi bisnis, ada juga kekurangan tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dan dokter.

**Kata Kunci :** Asimilasi; Anak Pidana; Pemasarakatan

### **ABSTRACT**

*Assimilation fulfills the correctional principle, which requires that prisoners cannot be separated from society. Assimilation can provide prisoners with opportunities to engage with the community through mentoring and community-based activities. In this way when they are free later, they can return to the community as part of the community and last but not least, can provide education and skills that they can later use in society. The purpose of this study was to identify the implementation of assimilation in the context of fostering state children and identify the obstacles faced in the implementation of assimilation at LPKA Class II Bandar Lampung. Assimilation is carried out by integrating prisoners with community life, with guidance designed to provide skills and education as well as being a means for prisoners to relate to community life outside. Constraints to assimilation at LPKA Class II Bandar Lampung include: lack of professionally and professionally educated officers, lack of interest in the people being served, lack of inmate trainers. In accordance with the needs of business technology, there is also a shortage of experts such as psychiatrists, psychologists, sociologists, and doctors.*

**Keywords:** *Assimilation; Criminal Child; Correctional*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada landasan filosofis Pancasila sebagai dasar bangsa dan landasan kehidupan bermasyarakat, dengan mengutamakan prinsip keserasian, keserasian dan keseimbangan jiwa dan raga bagi setiap individu. Atas dasar ini, lembaga pemasyarakatan tidak membuat narapidana pidana dihukum atas perbuatannya, tetapi memberikan pembinaan kepada narapidana dalam situasi seperti itu. Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana pada waktu tertentu karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim. Pembinaan agar orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana penjara, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan kepada mereka. Para tawanan yang nantinya berguna untuk menjadi warga negara. Itu baik dan dapat diterima di masyarakat.

Dari tahapan-tahapan di atas, salah satu cara yang dapat digunakan untuk pembinaan narapidana adalah dapat dilakukan melalui kegiatan asimilasi, yaitu pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, yang dapat dilakukan setelah narapidana telah menjalani setengah dari jumlah narapidana yang sebenarnya selama jangka waktu tertentu. waktu. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi, yaitu segala sesuatu yang ditempatkan dalam sistem budaya Indonesia dengan nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat Indonesia (Sudarto, 1986). Hal tersebut juga ditekankan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di dalam konsideran menimbang ditegaskan bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, lembaga bertujuan untuk mengubah sifat, cara berpikir dan perilaku, serta harus membentuk proses interaksi edukatif (Cooke, Baldwin, & Howison, 2008). Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan adalah melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pelepasan dan cuti bersyarat.

Asimilasi memenuhi asas pemasyarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dilakukan untuk membekali narapidana dengan pembinaan, keterampilan atau pendidikan untuk mempersiapkan hidup mandiri di masyarakat setelah menjalani hukuman dalam kebebasan. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan nanti di masyarakat.

Dalam kegiatan asimilasi, narapidana diperbolehkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar, yang dapat dilakukan melalui kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat, olahraga, mengikuti upacara, atau menunjukkan keterampilan dengan masyarakat. pelaksanaan program asimilasi yang dilakukan di luar lembaga Pemasyarakatan memiliki resiko yang besar bagi narapidana itu sendiri juga rakyat dimana narapidana tadi melakukan kegiatan asimilasi. buat itu dibutuhkan adanya persetujuan menggunakan masyarakat, dan narapidana yg bersangkutan wajib memenuhi persyaratan buat menjalankan program asimilasi.

Asimilasi diberikan pada narapidana sesudah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bila narapidana sudah menjalani 1/2 asal masa pidananya dan berdasarkan penilaian TPP telah memenuhi segala persyaratan, maka TPP atas persetujuan kepala forum Pemasyarakatan dapat mengajukan usulan terhadap narapidana tadi buat menjalani proses asimilasi kepada kantor daerah Kementerian aturan serta HAM. Asimilasi diberikan sebagai realisasi proses pembinaan, yang bertujuan yaitu disamping melindungi rakyat jua menyampaikan pembinaan bagi narapidana agar sehabis menjalani masa pidananya mempunyai persiapan kembali ketengah-tengah masyarakat menjadi bagian berasal masyarakat tadi yang memiliki bekal ketrampilan, sehingga bisa berguna bagi kepentingan diri sendiri, famili, warga , bangsa, dan negara.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apasaja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi pidana anak pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung dan bagaimana upaya mengatasinya?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis pada melakukan penelitian ini merupakan penelitian realitas. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis buat mengkaji pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung. sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. asal Data primer

Adapun asal data primer penelitian ini mengacu di akibat penelitian lapangan, bukan hasil olahan orang lain, berupa wawancara menggunakan Kasi Binadik, Kasi Bimkesmaswat dan Kaur umum LPKA Kelas II Bandar Lampung, serta beberapa anak pidana yg sedang melaksanakan asimilasi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.

- b. asal Data Sekunder

Asal data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh berasal penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat fakta serta penelusuran berasal internet yg berkaitan dengan asimilasi bagi anak pidana.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Asimilasi sebagai Upaya Pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan rakyat serta menuju kepada integritas kehidupan serta penghidupan. Pemasyarakatan menjadi proses berkiprah dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya penyesuaian diri pada lingkungan integritas, sebagai akibatnya narapidana yg bersangkutan menuju ke arah perkembangan langsung melalui asosiasinnya sendiri sesuai dengan integritas kehidupan serta penghidupan (Poernomo, 1985).

Untuk memperlancar proses pemasyarakatan narapidana selama menjalani masa pidananya di LPKA Kelas II Bandar Lampung, narapidana diikutsertakan pada banyak sekali bentuk aktivitas training. training terhadap narapidana bertujuan buat berakibat narapidana menjadi manusia mandiri dan mencegah melakukan perbuatan melawan hukum kembali serta

ialah salah satu usaha buat membangun suasana aman serta tertib, pada warga , serta mempersiapkan narapidana agar dapat terjun kembali secara sehat ke pada warga .

Menggunakan berpegang pada prinsip dasar diatas dibutuhkan sistem pemasyarakatan bisa mencapai yg primer adalah mencegah pengulangan pelanggaran aturan, aktif produktif serta bermanfaat bagi warga dan bisa hayati senang didunia dan akhirat (Atmasasmita, 1982). sehingga sistem pemasyarakatan pada Indonesia wajib diartikani sebagai upaya pembinaan narapidana dan memperlakukan cara baru terhadap narapidana berdasarkan prinsip universal yg telah berkembang secara internasional. aktivitas pelatihan dapat dilakukan menggunakan pembimbingan serta aktivitas lainnya, yang berupa pemberian keterampilan maupun pendidikan di narapidana. pelatihan menggunakan bimbingan yg diprogramkan pada pada rumah Tahanan Negara bisa dilakukan dengan upaya asimilasi.

Tujuan dari pelaksanaan asimilasi ialah agar narapidana bisa menyesuaikan diri secara sehat terhadap masyarakat sehabis menjalani masa pidananya sebagai akibatnya narapidana dapat berinteraksi dengan baik dengan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip utama pemasyarakatan yang galat satunya dimaksudkan yaitu selama kehilangan kemerdekaan beranjak narapidana wajib diperkenalkan dengan warga dan tidak boleh diasingkan berasal kehidupan warga.

Bentuk aktivitas asimilasi yg dilaksanakan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan dua tahap yaitu:

a. Asimilasi didalam LPKA Kelas II Bandar Lampung.

dalam bentuk kegiatan ini narapidana diperkenalkan mengenai keadaan lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung, termasuk petugas serta penghuni lainnya, yg dimaksudkan agar narapidana dapat mengikuti keadaan menggunakan lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung sehingga bisa mempermudah narapidana dalam menjalani hukumnya termasuk pada bersosialisasi menggunakan lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung.

b. Asimilasi diluar LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Bentuk kegiatan ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Bekerja di pihak ketiga

aktivitas ini bisa dilakukan di perusahaan atau instansi swasta, pemerintahan juga perorangan dengan kondisi :

- Surat permohonan berasal perusahaan atau instansi terkait bahwa dibutuhkan narapidana buat dipekerjakan diperusahaan atau instansi tadi menggunakan persetujuan dari ketua lingkungan dimana perusahaan itu berada.

- Dilampirkan surat biar perjuangan.

- Dilampirkan berita program tentang perjanjian kerja.

2. Bekerja diluar tembok LPKA Kelas II Bandar Lampung

aktivitas ini dilakukan dengan cara bekerja pada kebun yang terdapat diluar tembok LPKA Kelas II Bandar Lampung dimana kebun itu ditanami tebu.aktivitas ini juga bisa dilakukan menggunakan mengadakan kegiatan kerja bakti diluar LPKA Kelas II Bandar Lampung yg tentunya narapidana yang dipekerjakan harus memenuhi persyaratan yg dipengaruhi.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung**

Perkembangan ke arah kemajuan senantiasa diusahakan dari hari ke hari, namun demikian sesuai menggunakan kondisi yg terdapat tidaklah sedikit kendala- hambatan yang dihadapi. Hal-hal yang menjadi kendala pada pelaksanaan pembinaan narapidana melalui upaya asimilasi yaitu:

a. Petugas Pelaksana pelatihan

Keterbatasan jumlah petugas pelaksana pembinaan sangat mensugesti kelancaran pada membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pelatihan narapidana termasuk asimilasi. pada asimilasi memerlukan pengawasan yg seksama sebab narapidana dihadapkan menggunakan kehidupan rakyat, sehingga kiprah petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung sangat krusial dalam memberikan supervisi terhadap narapidana.

b. Narapidana

Narapidana menjadi pihak yang dibina pada aplikasi asimilasi poly yg kurang menyadari akan pentingnya pelaksanaan asimilasi. Hal ini antara lain disebabkan karena para narapidana pada umumnya kurang meyakini pentingnya pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung buat kehidupan dimasa yg akan datang sehabis mereka bebas. Hal ini menyebabkan narapidana tidak memanfaatkan saat dan kesempatan yang diberikan sang petugas aplikasi pelatihan pada mereka dengan sebaik- baiknya, sedangkan training yang diberikan lebih banyak ditentukan serta diarahkan oleh pihak lembaga. Hal yang mendasari pertimbangan ini diantaranya karena memang wahana training yg terdapat sangat terbatas, serta segala acara training dan pesertanya ditentukan sang bimbingan asal LPKA Kelas II Bandar Lampung demi ketertiban serta kelancaran tugas, hal ini secara tidak langsung akan mensugesti aplikasi pembinaan terhadap narapidana pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.

c. rakyat

Hubungan narapidana menjadi sebuah hubungan sosial yang mendeskripsikan keterikatan antara sesama narapidana, narapidana menggunakan lingkungan dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung termasuk petugasnya dan adanya interaksi narapidana menggunakan rakyat yang terjadi selama proses kehidupan narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Hal yang adalah kendala pada aplikasi pembinaan terhadap narapidana (asimilasi) sesuai dengan yang akan terjadi wawancara berkata bahwa aplikasi pembinaan terhadap narapidana (asimilasi) adalah penerimaan masyarakat setempat terhadap narapidana tadi. Dipertimbangkan unsur masyarakat artinya sesuatu yang rasional serta tepat mengingat bahwa narapidana merupakan anggota rakyat yg sudah melanggar hukum serta nantinya narapidana akan balik ketengah masyarakat sehabis bebas nanti. poly diantara mereka yang bersikap sinis terhadap narapidana, akibatnya narapidana tersebut akan merasa kehilangan agama asal warga , kehilangan akan harga dirinya bahkan akan menyebabkan kehilangan gairah hidupnya didalam menempuh kehidupan selanjutnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung ialah mengikuti aktivitas ibadah pada luar LAPAS, kerja sosial dan kerja bakti pada rakyat, kerja di sekitar LAPAS, kerja pada ladang sawah, kolam peternakan ikan serta daerah cucian mobil dan motor milik LAPAS. tidak terdapat bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ketiga.
- b. Hambatan-kendala yg dihadapi pada pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana pada LPKA Kelas II Bandar Lampung yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat lebih kurang, minimnya dana atau sarana dan prasarana buat asimilasi, serta asal diri anak pidananya itu sendiri, seperti karakteristiknya yg berbeda (labil), ketidakinginan buat berasimilasi, perilaku apatis anak pidana.

- c. Upaya yang dilakukan sang pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung pada mengatasi kendala-kendala asimilasi ialah mencarikan cara lain pada pengurusan mekanisme asimilasi, cara lain energi ahli, cara lain berasal pihakpihak luar, mengajukan penambahan aturan asimilasi serta mengikutsertakan anak pidana pada bimbingan rohani atau keagamaan.

### **Saran**

- a. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah buat bisa meringankan prosedural pengajuan asimilasi, mencarikan cara lain pelaksanaan asimilasi serta tempat buat menampung anak pidana yg berasimilasi.
- b. harus ada sinergi yg strategis antara pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, anak pidana, warga serta Pemerintah agar dapat menghilangkan kendala-hambatan yang ada dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana.
- c. Haruslah ada keluwesan ruang gerak LPKA Kelas II Bandar Lampung pada upaya pemenuhan kebutuhan forum sendiri karena hanya LPKA Kelas II Bandar Lampung sendiri yang mengetahui serta mengerti kebutuhan mereka.
- d. Menambah aturan pelatihan terutama buat asimilasi, mengadakan bentukbentuk kegiatan asimilasi yg baru dan menaikkan kerjasama dengan lembagalembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan, perusahaan-perusahaan, serta pihak ketiga lainnya untuk turut aktif pada pelatihan anak pidana khususnya di tahap asimilasi.

### **Daftar Bacaan**

- Abdulkadir, Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Aksara, K. (2004). *LPAN Gianyar Dulu dan Kini* (Edisi XV).
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Cooke, D. J., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumbi.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1991). *Lembaga permasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi ketiga). Bandung : Refika Aditama.